

Judul : Rakyat menanti Pansus DPR tuntaskan konflik agraria
Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

REFORMA AGRARIA

Rakyat Menanti Pansus DPR Tuntaskan Konflik Agraria

Setiap tahun, jumlah kasus konflik agraria terus bertambah. Konflik struktural terkait ketimpangan penguasaan tanah ini tidak hanya membenturkan rakyat dengan pihak tertentu, tetapi juga menelan korban. Tahun 2025 yang baru saja berlalu, masih diwarnai sejumlah konflik agraria.

Pada akhir November lalu, misalnya, lima petani di Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, diduga kuat ditembak petugas keamanan perusahaan sawit. Video yang menggambarkan petani bersimbah darah sempat ramai tersebar di media sosial.

Ketua Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) Edi Her-

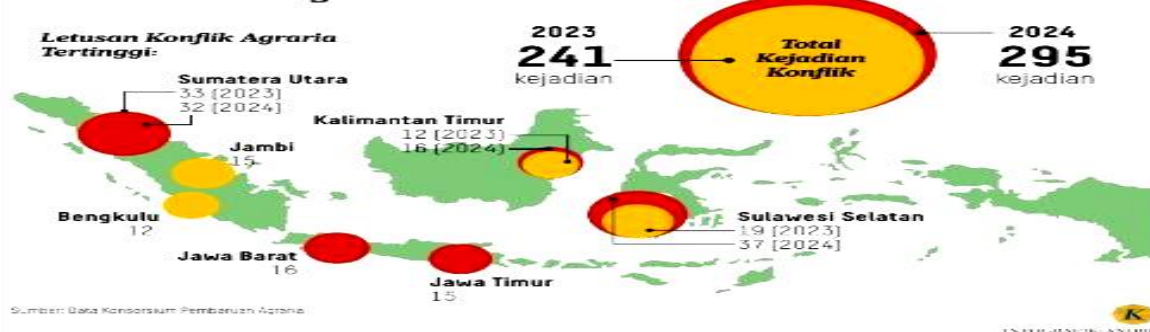
manto menuturkan, peristiwa bermula ketika sejumlah petani mendapati pekerja perusahaan membuka jalan baru dengan alat berat yang merusak tanaman warga. Mereka lalu meminta pihak perusahaan pergi dari wilayah itu.

Namun, pekerja menolak. Keributan kedua pihak tak terhindarkan hingga terdengar suara letusan. Pihak keamanan perusahaan diduga menembak membabi buta dan mengenai lima petani, termasuk Edi. Empat petani lainnya adalah Buyung, Linsurman, Santo, dan Suhardin.

Dari kelima korban, Buyung sempat dirawat intensif di

[Bersambung ke hlm 15 kol 3-5]

Sebaran Konflik Agraria



Rakyat Menanti Pansus DPR Tuntaskan

[Sambungan dari halaman 1]

rumah sakit setempat karena luka berat. "Sekarang, Pak Bu yang sudah di rumah dan bisa berjalan. Tapi, belum pulih total," ucap Edi saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Menurut dia, penembakan akhir tahun itu merupakan salah satu puncak konflik agraria yang dialami petani. Sebelumnya, sejak perusahaan sawit masuk tahun 2012, konflik mulai muncul. Petani mengaku merasa diintimidasi hingga ancaman untuk meninggalkan lahan harapannya.

Edi menambahkan, upaya penyelesaian konflik telah ditempuh beberapa kali. Salah satunya melalui pembentukan panitia khusus di DPRD Bengkulu Selatan pada 2017. "Tapi, hasilnya tidak tahu. Tahun ini, DPRD juga buat pansus. Kami pernah dipanggil, tapi belum tahu kelanjutannya," ujarnya.

Penembakan petani di Bengkulu hanya salah satu dari kasus-kasus konflik agraria yang kerap terjadi di Tanah Air. Pada 7 Oktober 2023, misalnya, Gijik (35), warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, tewas ditembak aparat kepolisian setempat.

Kala itu, ia mengikuti aksi menuntut perusahaan sawit mengembalikan lahan warga yang dirampas perusahaan. Aksi itu sudah dilakukan sehari-hari lantaran perusahaan tidak menjalankan kewajiban mereka menyipkan kebun plasma untuk rakyat.

Konflik agraria yang menelan korban jiwa juga terjadi sepuluh tahun silam. Pada 27 Februari 2015, Indra Pelani, anggota Serikat Tani Tebo di

Kabupaten Tebo, Jambi, tewas dikeroyok petugas keamanan salah satu perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri setempat.

Koordinator Konsorsium Pemberantasan Agraria (KEA) Wilyah Jambi Frandody menyebut, pembunuhan Indra merupakan sejarah kelam yang dilalui petani di Tebo. Namun, konflik itu telah berlangsung sejak 1999 dan menguasai perusahaan menguasai lahan warga," ujarnya.

Pansus DPR

Di tengah konflik agraria yang melonjak, KPA dan sejumlah perwakilan organisasi petani menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2025, di DPR. DPR lalu merespons dengan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria (Pansus PKA) pada 2 Oktober lalu.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengungkapkan, pembentukan pansus seharusnya menjadi langkah awal dan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria. Namun, komitmen tersebut perlu dikawal berbagai pihak.

Apalagi, setelah lebih dari dua bulan, Dewi menilai, pansus belum memberikan langkah konkret dalam penyelesaian konflik agraria.

Menurut Dewi, pansus harus segera bertindak agar tidak ada waktu terbuang dalam penyelesaian konflik agraria. "Apalagi, rata-rata butuh 20 tahun sampai 25 tahun untuk menyelesaikan satu konflik agraria. Kalau ada ribuan kasus, berarti penyelesaiannya bisa puluhan ribu tahun," ujarnya.

Secara terpisah, Muhammad

Khazin, anggota Pansus PKA dari Fraksi PKB, mengungkapkan, persoalan agraria harus dibenahi mulai dari hulu, yakni kebijakan dan regulasi yang sering kali melahirkan paradoks di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah membuat peta jalan penyelesaian konflik.

Peta jalan penyelesaian konflik agraria ini meliputi berbagai cara. Pertama, pansus sedang mendorong pembentukan aturan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) dalam pendaftaran tanah atau aset.

Langkah kedua, penertiban tanah eks hak guna usaha (HGU) perusahaan swasta maupun "pelat merah". Namun, upaya ini terkendala perbedaan tafsir status hukum lantaran Kementerian ATR/BPN hanya mengatur hak tanah, sedangkan Kementerian Pertanian mengatur izin usaha.

Ketiga, pembenahan tanah rakyat di dalam kawasan hutan. Dalam upaya pembenahan, pihaknya secara konsisten mendorong pembuatan kebijakan satu peta (*one map, one policy*).

Maria SW Sumardjono, Guru Besar Fakultas Hukum UGM dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai konflik agraria terus terjadi karena ketimpangan dalam penguasaan atau kepemilikan tanah antara kedua pihak yang posisi tawarnya berbeda. Jurang ketimpangan ini bahkan kian dalam.

Konflik ini dapat diatasi dengan reformasi agraria, yakni redistribusi lahan serta penataan aset dan aksesnya. Namun, pelaksanaannya belum sesuai harapan karena tumpang tindih aturan. (IKL/IDO/ITA/BOW)